Pengaruh Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji

Muhammad Alfa Fathansyah¹, Irwansyah^{*2}

¹ Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin

² Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

* E-mail: irwansyahrawydharm@yahoo.com

Abstract

This study aims to determine the management of the Hajj bailout funds at Bank BNI Syariah and the application of the Hajj Fund to the waiting list of Hajj services in Makassar City. The approach used in this study is a qualitative approach. This research was conducted at Bank BNI Syariah in Makassar City by conducting interviews with Operational Managers and at the Office of the Ministry of Religion of South Sulawesi Province by conducting interviews with the Head of the Registration Section and Hajj Documents. The results of the study show that: (1) Bank BNI Syariah provides convenience to customers who want to go on hajj according to procedures that are based on sharia banking principles, (2) The Hajj Bailout Fund Program creates an element of Gharar or obscurity in the waiting list of pilgrimage quota in the City Makassar.

Keywords: Bank; BNI Syariah; Bailout; Hajj; Waiting List

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pelaksanaan dana talangan haji pada bank BNI Syariah dan bagaimana pengaruh Program Dana Talangan Haji terhadap waiting list ibadah haji di Kota Makassar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Bank BNI Syariah di Kota Makassar dengan melakukan wawancara kepada Operational Manager dan pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dengan melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bank BNI Syariah memberi kemudahan kepada nasabah yang ingin berangkat haji sesuai prosedur yang didasarkan pada prinsip-prinsip perbankan syariah, (2) Program Dana Talangan Haji menimbulkan unsur Gharar atau ketidakjelasan pada waiting list kuota ibadah haji di Kota Makassar.

Kata Kunci: Bank; BNI Syariah; Dana Talangan; Haji; Waiting List

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbanyak di dunia yakni mencapai 88%. Dengan jumlah penduduk muslim yang sedemikian banyak, tidak dapat dipungkiri pendaftaran pemberangkatan untuk melaksanakan ibadah haji terus mengalami peningkatan yang signifikan. Besarnya animo

masyarakat dalam rangka memperoleh gelar Haji menjadi alasan yang tidak bisa terbantahkan, namun kebanyakan masyarakat di Indonesia salah mengartikannya dengan menganggap haji merupakan sebuah gelar yang didapatkan setelah menjalankan ibadah tersebut, padahal tidak demikian. Di Provinsi Sulawesi Selatan misalnya, jumlah kuota pemberangkatan Haji pada tahun 2014 saja mencapai 5777 antrian.¹

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Agama Islam dan menjadi bagian dari Agama Islam.² Dalam konsepsi Hukum Islam, dasar dan kerangka Hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan hukum manusia dan manusia, manusia dengan benda, tetap juga mengatur tentang manusia dan Tuhan-Nya. Interaksi manusia dengan segala tata hubungan itu semua diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang dalam bahasa Arab disebut *hukm*.³ Secara umum, sering dirumuskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak dengan cara mengambil serta melakukan segala hal yang baik dalam artian bermanfaat dan mencegah serta menolak segala hal yang bersifat mudharat atau tidak mendatangkan manfaat.⁴

Salah satu Rukun Islam yang terdapat pada Rukun Islam yang ke-5, yaitu Naik Haji Bagi yang Mampu. Ibadah Haji diwajibkan kepada umat Islam yang Baligh, berakal, merdeka, dan mampu dari segi badan maupun harta sekali seumur hidup. Hal ini juga terdapat pada firman Allah dalam Q.S Al Imran 97 yang isinya:⁵

"Mengerjakan Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan."

Begitu juga dalam firman Allah Q.S Al. Baqarah 158 yang isinya:

"Maka barangsiapa yang beribadah Haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak akan ada dosa baginya."

Selain ayat-ayat diatas, terdapat sebuah hadist mengenai kewajiban ibadah haji yang sumbernya dari Ibnu Umar ra, yang berbunyi :

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda bahwa, "Islam didirikan atas lima pilar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah dengan benar) selain Allah S.W.T dan Muhammad SAW utusan Allah, mendirikan Shalat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadhan."

Ruang lingkup ibadah Haji tergolong kedalam lingkup hukum syariah yaitu ibadah amaliah lahiriah antara manusia dan Allah. Syariah yaitu himpunan peraturan yang bersumber dari Al Quran serta Sunnah-sunnah yang kebenarannya tidak perlu diragukan, yang juga dibawa oleh Rasulullah yang juga termasuk wahyu Allah yang sifatnya tidak akan berubah. Selain itu, terdapat lima syarat-syarat haji, yakni

¹ Kompas. Dikutip pada laman website; <https://nasional.kompas.com/read/2016/09/22/19115041/.waiting.list.hingga.18.tahun.ini.perbandingan.kuota.haji.indonesia.dengan.jumlah.pendaftarannya> diakses pada 23 November 2016

² Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, 1998, Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia, ctk. Keenam, PT Raja Grafindo Prersada, Jakarta, hlm 41

³ Ibid

⁴ Abdullah Marlang Dkk, Pengantar Hukum Indonesia cetakan kedua, (Makassar : Aspublishing, 2011) Hal. 93

⁵ Natsir et all, Pendidikan Agama Islam , Makassar, 2010, Hlm :53

beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Beragama Islam yang dimaksudkan tidak beragama lain selain Islam. Baligh yang dimaksudkan adalah orang dewasa yang diwajibkan berhaji, sedangkan anak-anak tidak wajib haji. Berakal sehat yang dimaksudkan orang yang sehat akalnya atau tidak gila. Merdeka yang dimaksudkan umat Islam yang akan melaksanakan ibadah haji, tidak berstatus sebagai budak. Mampu yang dimaksudkan yaitu mampu secara harta, sehat secara fisik dan mental, ada kendaraan menuju makkah, dan bagi wanita harus bersama mahramnya.

Setiap keberangkatan ibadah Haji dengan membawa harta dan jiwanya menuju ke tanah suci pada waktu yang telah ditentukan, oleh karena itu membuat terciptanya hubungan hukum yang perlu di atur agar tercipta kenyamanan dan ketertiban bersama. Sehingga demikian, meskipun Haji merupakan ibadah *mahdhah* (ibadah dalam arti sempit atau ritual langsung kepada Allah) tetapi pada pelaksanaannya terkait juga dengan hak dan kewajiban orang lain yang sama-sama sedang menunaikan Ibadah Haji. Maka pelaksanaan Ibadah Haji menjadi bagian dari hukum muamalah (ibadah dalam arti luas).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat (2) Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut: "*Kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah.*"

Maksud dari kandungan salah satu pasal ini adalah bagaimana ibadah Haji menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam praktiknya masyarakat Indonesia khususnya calon jemaah Haji merupakan elemen tak terpisahkan dari manajemen penyelenggaraan ibadah Haji. Jika memperhatikan konsep masyarakat madani pada hukum Islam sesuai kandungan Piagam Madinah, sangat diharapkan Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia dapat memberi kontribusi nyata dibidang politik, sosial, ekonomi demi kepentingan bangsa Indonesia.⁶

Menghubungkan perkembangan ekonomi baik secara teoritis maupun praktisnya, maka ekonomi syariah dalam perkembangannya tidak menutup diri terhadap berbagai perkembangan. Islam sebagai ajaran dan pedoman maka ia dapat dihubungkan pada setiap fenomena kehidupan yang terjadi meskipun tak dapat dipungkiri juga dapat dikatakan masih tertinggal bila dibandingkan dengan perkembangan ekonomi konvensional. Oleh karenanya, Islam sebagai sebagai ajaran dan pedoman senantiasa menjadi filter terhadap fenomena yang muncul.⁷

Berangkat dari permasalahan ini, hadirilah lembaga keuangan guna memudahkan calon jemaah haji yang hendak berangkat haji dalam pembayaran BPIH untuk mendapatkan porsi antrian/*seat haji*. Di Indonesia, mayoritas lembaga keuangan yang menjalankan praktik layanan ini adalah Bank Syariah.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah menurut dan jenisnya terdiri dari Bank umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁸ Dahlan Siamat menyebutkan bahwa

⁶ Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama Islam, UPT MKU Unhas, 2013: Hlm 94

⁷ Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Vol.12, 2004, Hlm 13

⁸ Mardani, Aspek Hukum Lembaga Syariah di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, Hlm 11

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai prinsip syariah yaitu Al Quran dan Al Hadist.⁹ Bank Syariah juga diartikan sebagai bank yang tata cara beroperasinya didasarkan bagaimana tata cara bermuamalah dalam Islam, yakni dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan Al Quran dan Al Hadist yang operasionalnya harus berpedoman pada bentuk-bentuk usaha yang tidak dilarang oleh Rasulullah yang tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Islam¹⁰. Bank Syariah juga menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai syariah Islam dan tidak menggunakan bunga.¹¹ Dalam hal ini penggunaan sistem bunga sangat dilarang dalam Islam.

Demikian sebagaimana tujuan Bank Konvensional, Bank Syariah di Indonesia turut diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan (agent of development) yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak, Hal ini sekaligus menegaskan keberadaan Bank Syariah di Indonesia bukan hanya ditujukan untuk sekelompok rakyat tertentu, tetapi juga untuk kepentingan peningkatan rakyat Indonesia secara menyeluruh.¹²

Berdasarkan pemaparan terkait Bank Islam yang dikemukakan di atas, maka disimpulkan bahwa yang dimaksud bank Islam atau Bank Syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana bagi masyarakat yang sistem dan mekanisme usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Al Quran dan Al Hadist.

Pada Bank Islam umumnya dibentuk suatu lembaga pengawas yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian produk, jasa, dan kegiatan usaha oleh Bank Islam tersebut agar tidak bertentangan dengan Al Quran dan Al Hadist.¹³ Lembaga inilah yang memberikan fatwa kepada bank yang bersangkutan¹⁴. Selain itu, Bank Syariah juga memiliki visi dan misi yaitu:

a. Visi Perbankan Syariah yaitu:¹⁵

Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka kedailan, tolong menolong, menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat”.

b. Misi Perbankan Syariah yaitu:¹⁶

1. Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi, serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan.
2. Mempersiapkan konsep terkait pelaksanaan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah sesuai dengan karakteristiknya

⁹ Muhammd Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta 2001, Hlm 12

¹⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. PT Prenada Media (Kencana) Badan Penerbit FH-UI, 2005, Hlm 23

¹¹ Ibid, Hlm 23

¹² Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, Hlm 46

¹³ Jumadil. (2018). “Dinamika Sosial Pendidikan Islam di Mesir”. *Jurnal Keislaman Al-Ribath* 4, 119

¹⁴ *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* Vol.19, 2011, Hlm 484

¹⁵ Mardani, Op Cit, Hlm 27

¹⁶ Mardani, Op Cit, Hlm 27

3. Mempersiapkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi operasional perbankan syariah
4. Mendesain kerangka *entry* dan *exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan.

Bank Syariah juga dalam pengoprasiaannya berpedoman pada asas-asas tertentu yaitu:

- a. Prinsip Syariah, kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:
 1. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mengharuskan nasabah penerima dana mengembangkan fasilitas melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*)
 2. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti bersifat untung-untungan
 3. *Gharar*, yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur terpisah dalam syariah
 4. *Haram*, yaitu transaksi yang obyeknya tidak sesuai syariah
 5. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak lainnya.
- b. Demokrasi Ekonomi, adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan pemanfaatan
- c. Prinsip kehati-hatian, adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemenuhan prinsip syariah, yaitu memenuhi:¹⁷

- a. Prinsip keadilan (*adl*), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
- b. Prinsip keseimbangan (*tawazun*), yaitu meliputi keseimbangan aspek materil dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor rill, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
- c. Prinsip kemaslahatan (*mashlahah*), yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, materiel dan spiritual, individual dan kolektif, serta memenuhi tiga unsur, yakni kepatuhan (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*), dan semua aspek yang tidak menimbulkan kemudharatan.
- d. Prinsip universalisme (*alamiyah*), yaitu dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*)

¹⁷ Mardani, Op Cit, Hlm 25-26

Adapun fungsi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:¹⁸

- a. Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
- b. Menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, dan hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Menerima dana yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)

Seorang calon jemaah haji yang hendak berangkat haji harus memiliki uang sejumlah 25 juta rupiah sebagai BPIH untuk mendapat nomor seat atau daftar tunggu pemberangkatan haji dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu telah penuh hingga empat atau lima tahun kedepan. Maka dapat disimpulkan, umat muslim baru dapat berangkat untuk pergi haji enam atau tujuh tahun lagi.

Hal ini turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 yang mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 pasal 5 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji:

Setiap Warga Negara yang akan menunaikan ibadah Haji berkewajiban sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji kantor Kementerian Agama Kab/kota setempat.
- b. Membayar BPIH yang disetorkan melalui Bank penerima setoran
- c. Memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Dengan demikian, DSN (Dewan Syariah Nasional) memberi kesempatan pada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) untuk memenuhi kebutuhan terkait pelunasan BPIH yang membuka peluang bagi Bank Syariah melakukan praktek layanan Dana Talangan Haji.

Pembiayaan talangan Haji atau Dana Talangan Haji adalah pinjaman (*qardh*) dari Bank Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) Haji pada saat pelunasan BPIH. Terdapat pula hadist Nabi SAW yang berbunyi:

"Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu'sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya."

Kutipan hadist di atas turut menjadi landasan dari dijalankannya praktek layanan ini. Namun pada prakteknya, Dana Talangan Haji menimbulkan pertanyaan terkait pengelolaan pelaksanaannya pada Bank Syariah serta tinjauan pelaksanaan praktek ini dari aspek Hukum Islam nya. Adanya ketidakjelasan mengenai mekanisme pengelolaan pelaksanaan dana talangan haji oleh pihak Bank menimbulkan tanda tanya, misalnya bagaimana tahap-tahap mengikuti layanan Dana Talangan Haji yang dijalankan oleh Bank Syariah serta bentuk bantuan seperti apa yang

¹⁸ Mardani, Op Cit, Hlm 26-27

ditawarkan Bank Syariah pada layanan ini, serta karena program ini berkaitan langsung dengan kuota antrian (*waiting list*) ibadah haji.

Berangkat dari pemaparan dan analisis singkat di atas, maka hal-hal yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut: Pertama, bagaimana pengelolaan pelaksanaan Program Dana Talangan Haji pada Bank Syariah; Kedua, pengaruh Program Dana Talangan Haji terhadap *waiting list* ibadah Haji di Kota Makassar.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data primer maupun data sekunder melalui wawancara dan mengarsipkan dokumen-dokumen. Penelitian dilakukan pada Bank BNI Syariah di kota Makassar, yang menjalankan Program Dana Talangan Haji. Pengambilan data juga dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang diperoleh juga dianalisis secara kualitatif, yakni analisis yang mendeskripsikan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder yang tidak dapat dikuantifikasi, sehingga harus diberi interpretasi dan simpulan.

3. Pengelolaan Pelaksanaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah

Dewasa ini terdapat banyak cara yang dapat ditempuh untuk memudahkan umat Islam pergi berhaji, salah satunya mengikuti program layanan Dana Talangan Haji. Dana Talangan Haji merupakan pinjaman berupa dana/uang untuk melaksanakan ibadah haji yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada calon jemaah haji. Pinjaman dana yang diberikan oleh lembaga ini guna menutupi kekurangan dana nasabah peserta layanan untuk memperoleh nomor porsi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji).

Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan layanan ini di Indonesia adalah bank Syariah. Salah satu Bank Syariah yang pernah menjalankan praktek layanan ini yaitu Bank BNI Syariah cabang Makassar. Program Layanan Dana Talangan Haji merupakan program yang murni dijual oleh Bank kepada orang-orang yang ingin berangkat melaksanakan ibadah haji. Bank Syariah dalam menjalankan program ini berpedoman pada beberapa fatwa MUI Hal yang dijadikan Bank Syariah sebagai dasar dalam pelaksanaan program layanan ini adalah Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) yaitu: Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa DSN-MUI no.29/DSN-MUI/IV/2002.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, beberapa isi fatwa yang dianggap dapat dijadikan dasar melaksanakan program layanan Dana Talangan Haji antara lain:

1. *Al-Qardh* merupakan pinjaman yang diberikan oleh LKS kepada nasabah
2. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima sesuai waktu yang disepakati bersama
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan/melunasi kewajibannya, maka LKS dapat menghapus seluruh kewajiban nasabah.

Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ujrah*/Uang jasa, beberapa isi fatwa yang dianggap dapat dijadikan dasar melaksanakan program layanan Dana Talangan Haji antara lain:

1. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
2. Membayar upah dan menggunakan barang sesuai kontrak
3. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan pembayaran upah/ jasa yang diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/IV/2002, tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS, beberapa isi fatwa yang dianggap dapat dijadikan dasar melaksanakan program layanan Dana Talangan Haji antara lain:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan/jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip Al-Ijarah sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembiayaan BPIH.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

Selain itu, alasan Bank Syariah melaksanakan program layanan ini tidak lain adalah pahala, dimana tentu saja umat muslim akan memperoleh pahala bila membantu sesama muslim, apalagi dalam hal ini membantu melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah 5:2:

"Bertolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan."

Alasan lain adalah profit (keuntungan) yang hendak diperoleh Bank Syariah dari setiap transaksi pada program layanan ini. Dalam pelaksanaan layanan Dana Talangan Haji yang pernah berjalan di Bank BNI Syariah cabang Makassar, terdapat alur dan prosedur yang ditetapkan oleh Bank terkait hal-hal yang perlu diperhatikan oleh calon nasabah, yaitu:¹⁹

- a. Nasabah yang hendak menjalankan haji namun tidak memiliki uang sejumlah 25 juta rupiah dapat mengikuti layanan Dana Talangan Haji yang merupakan program yang dimiliki suatu Bank Syariah, dalam hal ini Bank BNI Syariah
- b. Nasabah yang berniat mengajukan pembiayaan talangan haji harus melengkapi persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh Bank.
- c. Persyaratan administrasi yang diajukan oleh Bank yaitu laporan keuangan nasabah selama tiga bulan terakhir
- d. Bank wajib menolak apabila: nasabah memiliki utang di tempat lain dan pendapatan disesuaikan dengan kondisi jumlah anggota keluarga, misalnya jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai. Bank juga wajib menolak apabila kemampuan bayar nasabah tidak sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Bank yang pada akhirnya dinyatakan tidak sanggup membayar/melunasi yang semuanya ditinjau dari laporan keuangan nasabah.
- e. Apabila Bank telah menyatakan laporan keuangan nasabah (syarat administrasi) diterima dan dinyatakan dapat mengikuti layanan Dana Talangan Haji, maka

nasabah akan diberikan fasilitas berupa pembukaan rekening haji oleh Bank yang dimana dari rekening haji inilah, nasabah akan cair pembiayaannya. BPIH untuk ibadah Haji sebesar 25 juta rupiah untuk mendapatkan nomor porsi haji, apabila nasabah memiliki uang kurang dari 25 juta rupiah, maka Bank sebagai penyedia layanan akan mencairkan dana untuk menalangi selisihnya, misalnya nasabah hanya memiliki uang 5 juta rupiah, maka dana yang wajib dicairkan oleh Bank agar mencukupi untuk membayar BPIH adalah sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya apabila dana nasabah sudah berjumlah 25 juta rupiah, maka untuk setorannya ke Departemen Agama difasilitasi pihak frontliner yang disediakan oleh Bank

- f. Oleh karena telah membantu menalangi dana haji nasabah, maka Bank berhak atas uang *ujrah* (jasa) sebesar 2,5 juta rupiah. Jadi total yang harus dibayarkan nasabah adalah dana talangan yang diberikan oleh Bank ditambah uang *ujrah*, sebagai contoh dana yang cair dari Bank sejumlah 20 juta rupiah ditambah uang jasa sejumlah 2,5 juta rupiah maka keseluruhan jumlahnya adalah 22,5 juta yang harus dibayar nasabah kepada Bank.
- g. Jenis akad yang dijalin antara pihak Bank dan nasabah adalah akad ijarah, dimana Bank mengambil keuntungan dari ijarah (sewa-menyewa), jadi yang disewa adalah jasanya Bank yang dikenakan biaya sewa 2,5 juta kepada nasabah.
- h. Jangka waktu pelunasan maksimal 5 tahun, dan apabila belum lunas sampai jangka waktu yang disepakati, maka nomor porsi haji nasabah akan ditarik oleh Bank sebagai agunan (jaminan).
- i. Nasabah yang gagal melunasi sesuai jangka waktu yang disepakati, maka dana awalnya akan dikembalikan penuh oleh Bank.

Bank Syariah juga dalam menjalankan usaha harus sesuai dengan misi perbankan syariah yang secara umum harus melihat kondisi kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah, mempersiapkan konsep pengaturan pengawasan berbasis resiko guna menjamin kesinambungan operasional sesuai karakteristik masing-masing Bank Syariah, serta mempersiapkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi operasional perbankan syariah yang juga dapat menunjang stabilitas sistem perbankan syariah.

Prinsip-prinsip perbankan syariah juga merupakan hal yang tak kalah penting yang harus diperhatikan. Beberapa prinsipnya antara lain: Prinsip syariah (*Riba, Maisir, Gharar, Haram, Zhalim*), Demokrasi Ekonomi, dan Prinsip Kehati-hatian.

4. Pengaruh Program Layanan Dana Talangan Haji Terhadap Waiting List Ibadah Haji Di Kota Makassar

Dalam pelaksanaannya, Program layanan dana talangan haji yang dijalankan Bank BNI Syariah sejatinya adalah untuk mempermudah orang yang ingin berangkat haji dengan “menalangi” kekurangan dana haji yang harus dibayarkan agar dapat mendapat nomor antrian ibadah haji sebesar 25 juta rupiah.

Hanya saja, terdapat kendala yang dialami oleh bank syariah yaitu adanya nasabah peserta layanan ini yang mengalami masalah dalam pembiayaan. Berikut ini

merupakan data nasabah Bank BNI Syariah Kota Makassar yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Daftar Nasabah Dana Talangan Haji Pada Bank BNI Syariah

No.	No. Rek Pembiayaan	Nama Nasabah	keterangan
1	278565588	Harlina A.Md. Keb	Nasabah bermasalah
2	294052940	Nurhapsah Daeng Minne	Nasabah bermasalah
3	293464853	Jufri	Nasabah bermasalah
4	293467060	Samsiah	Nasabah bermasalah
5	293183077	Jumariah Daeng Nganne	Nasabah bermasalah
6	293186534	Ati	Nasabah bermasalah
7	293222927	Subaedah Daeng Kamma	Nasabah bermasalah
8	293232072	Daeng Ruki	Nasabah bermasalah
9	287952156	Syamsia	Nasabah bermasalah
10	287952496	Mahmudin	Nasabah bermasalah
11	287952882	Sempo	Nasabah bermasalah
12	287953193	Samsiah	Nasabah bermasalah
13	288489207	Salahuddin	Nasabah bermasalah
14	288490154	Sarpiah Daeng Saga	Nasabah bermasalah
15	288491238	Coa Daeng Talli	Nasabah bermasalah
16	289086353	Massi	Nasabah bermasalah
17	285878354	Sitti Rahmatia	Nasabah bermasalah
18	284151159	Ramlah Daeng Ngai	Nasabah bermasalah
19	284152630	Darwis	Nasabah bermasalah
20	284154149	Ronrong Daeng Sila	Nasabah bermasalah
21	284142779	Syamsiah Karek	Nasabah bermasalah
22	284155891	Kadir Sattu	Nasabah bermasalah
23	284832637	Saturi	Nasabah bermasalah
24	287953670	Rahmatia	Nasabah bermasalah
25	286024253	Kamaruddin Daeng Bella	Nasabah bermasalah
26	286431848	Nur Kamri	Nasabah bermasalah
27	275321861	Nurhayati	Nasabah bermasalah
28	273726382	Nurhayani	Nasabah bermasalah
29	275323711	Suniati B	Nasabah bermasalah
30	259970188	Murini Daeng Nini	Nasabah bermasalah
31	260050113	Sampara Daeng Gassing	Nasabah bermasalah
32	257599747	Muhammad Daeng Gassing	Nasabah Bermasalah
33	258679688	Sapatang Lau	Nasabah bermasalah
34	258682557	Daeng Rami	Nasabah bermasalah
35	258685489	Dahliyah	Nasabah bermasalah
36	257594353	Megayanti	Nasabah bermasalah
37	257596655	Maemunah Daeng Ngugi	Nasabah bermasalah
38	257588941	Hamsinah Daeng Baji	Nasabah bermasalah

Sumber: data Primer, (edited)

Berdasarkan tabel, maka dapat dilihat bahwa terdapat beberapa nasabah yang pembiayaan talangan hajinya bermasalah. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan pembiayaan talangan haji bermasalah, yaitu sebagian besar nasabah peserta layanan Dana Talangan Haji yang pembiayaannya bermasalah sebelum jatuh tempo, perubahan kondisi keuangan nasabah, sampai nasabah yang meninggal sebelum melunasi kewajiban yang dibebankan oleh bank.

Faktor paling umum dan kerap kali terjadi adalah nasabah yang tidak bisa melunasi pembayaran sebelum jatuh tempo. Misalnya nasabah dengan inisial S yang tidak dapat melunasi pembayaran sebelum jatuh tempo dengan alasan nasabah memiliki kewajiban untuk mendahulukan untuk membiayai kebutuhan yang lebih penting dalam hal ini misalnya memberi nafkah keluarga, disaat yang sama dengan jatuh tempo pelunasan pada bank, maka sesuai kesepakatan yang dijalin pihak Bank selaku yang pelaksana program layanan dengan nasabah sebagai calon jemaah yang akan berangkat haji, nomor porsinya dibatalkan melalui koordinasi Bank dan Kementerian Agama. Pihak Bank kemudian memiliki kebijakan mengembalikan dana nasabah yang tadinya disetorkan pada Bank agar dibantu/menalangi selisihnya, serta mengembalikan uang yang dibayarkan nasabah kepada Bank.

Faktor kedua adalah apabila terdapat nasabah yang mengalami perubahan pada kondisi keuangannya. Hal ini juga sempat terjadi pada beberapa nasabah peserta layanan Dana Talangan Haji di Bank BNI Syariah. Misalnya ada nasabah yang telah menjalankan kewajibannya untuk melunasi pembiayaan talangan hajinya pada Bank (termasuk uang *ujrah*) namun belum lunas sepenuhnya, seperti yang dialami nasabah dengan inisial KDB yang tiba-tiba mengalami nasib di PHK (Putus Hubungan Kerja) oleh tempat ia bekerja. Setelah ia di PHK kemampuannya secara ekonomi secara tidak langsung berkurang. Kondisi ini sudah tidak sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Bank dalam hal pelunasan yang menyebabkan kemampuannya untuk melunasi berkurang atau malah sepenuhnya sudah tidak dapat melakukan pembiayaan / membayar pada Bank. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan Bank memutuskan untuk membatalkan nomor porsi haji nasabah dan juga tentunya mengembalikan uang nasabah sepenuhnya tanpa mengambil sedikit pun.

Faktor ketiga adalah adanya nasabah peserta layanan Dana Talangan Haji yang meninggal dunia. Tentunya meninggalnya seluruh makhluk hidup di muka bumi ini semua atas kehendak dan izin Allah SWT, seperti yang dialami oleh inisial HDB karena sakit. Oleh karenanya apabila terdapat nasabah yang meninggal, secara otomatis nomor porsi hajinya akan dibatalkan oleh Bank Syariah.

Faktanya, Dana Talangan Haji merupakan program yang tidak diakui serta tidak dibolehkan oleh Kementerian Agama. Hal ini dikarenakan Definisi Dana Talangan sama saja dengan utang. Umat muslim tidak bisa menunaikan ibadah haji dalam kondisi memperoleh dana yang peruntukannya untuk BPIH dengan cara berutang. Umat muslim yang hendak menunaikan ibadah haji harus mampu secara finansial dan secara fisik jasmani sehat (*istita'ah*) sehingga dikatakan dapat menunaikan ibadah haji. Alasan lain yaitu tidak berutang, yang dimaksudkan disini adalah cara memperoleh uang untuk melunasi BPIH tidak diperoleh dengan cara berutang. Sementara Dana Talangan Haji dalam mekanisme pelaksanaannya "menalangi" kekurangan dana nasabah untuk melunasi BPIH.

Selain harus melunasi uang pembiayaan yang Bank berikan, nasabah juga harus melunasi uang jasa karena Bank telah membantu mempermudah nasabah dalam urusan menunaikan ibadah haji. Hal lain yang dapat terjadi adalah kegagalan nasabah dalam pelunasan, maka nomor porsi yang telah diberikan ke nasabah harus dikembalikan ke Bank, dan uang senilai 25 juta rupiah yang telah disetorkan ke Kementerian Agama akan dikembalikan juga ke Bank, lalu dana awal nasabah yang

sebesar 10 juta rupiah akan dikembalikan oleh nasabah. Sebagai tambahan bahwa mengenai pendaftaran haji dan pembatalan haji dilakukan di kantor Kementerian Agama tingkat dua (kota/kabupaten) dan mengenai pasport dan dokumen haji dilakukan di Kementerian Agama tingkat satu (Provinsi).

Berdasarkan pemaparan Tabel 2, diperoleh bahwa ternyata nasabah pengguna program Dana Talangan Haji yang bermasalah turut memengaruhi stabilitas kuota Haji di Kota Makassar. Pada tabel berikut dapat dilihat Daftar Kuota Haji Provinsi Sulawesi Selatan:

Tabel 2. *Waiting List* Kuota Haji Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	Kuota Normal (2012)	Pengurangan Kuota	Kuota (2013-2016)
1	Kota Makassar	1132	226	906
2	Kota Pare-Pare	121	24	97
3	Kab. Pinrang	356	71	285
4	Kab. Gowa	599	120	479
5	Kab. Wajo	403	81	322
6	Kab. Bone	745	149	596
7	Kab. Tana Toraja	35	7	28
8	Kab. Maros	310	62	248
9	Kab. Luwu	271	54	217
10	Kab. Sinjai	232	47	185
11	Kab. Bulukumba	405	81	324
12	Kab. Bantaeng	183	36	147
13	Kab. Jeneponto	341	68	273
14	Kab. Selayar	114	23	91
15	Kab. Takalar	261	52	209
16	Kab. Barru	170	34	136
17	Kab. Sidrap	251	50	201
18	Kap. Pangkep	301	60	241
19	Kap. Soppeng	249	50	199
20	Kab. Enrekang	186	37	149
21	Kab. Luwu Utara	228	46	182
22	Kab. Palopo	108	22	86
23	Kab. Luwu Timur	155	31	124
24	Tphd	65	13	52
		7221	1431	5777

Sumber: data Primer, (edited)

Kuota haji setiap provinsi di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, hampir setiap tahun mengalami perubahan (seringkali malah berkurang). Hal ini disebabkan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi yang dimana pemerintah Indonesia harus ikut menyesuaikan. Apabila dalam pelaksanaan program layanan Dana Talangan Haji banyak nasabah yang gagal melunasi, maka hal ini tentunya akan banyak memengaruhi kuota haji, dimana *waiting list* haji tidak valid dan tidak jelas atau dapat dikatakan mengandung unsur *gharar*. Oleh karena alasan-alasan tersebutlah yang membuat Kementerian Agama tidak lagi membolehkan program layanan Dana Talangan Haji berjalan.

5. Penutup

Dana talangan Haji yang merupakan program Bank Syariah dalam hal ini Bank BNI Syariah. Program ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin menunaikan ibadah Haji, yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam mekanisme pengelolaannya, program ini sudah amat jelas, namun tidak dapat dipungkiri terdapat juga kelemahan pada program ini. Mekanisme pelaksanaan program layanan Dana Talangan Haji yang pernah dijalankan oleh Bank BNI Syariah memberikan kemudahan kepada nasabah yang ingin berangkat Haji sesuai prosedur oleh Bank Syariah selaku pelaksana program layanan ini yakni sesuai pada prinsip-prinsip perbankan syariah. Program Dana Talangan Haji ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap *waiting list* ibadah Haji di Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya nasabah yang mengalami kegagalan dalam melunasi sesuai waktu yang ditentukan, akhirnya menyebabkan “Gharar” atau ketidakjelasan terhadap *waiting list* ibadah yang menjadikannya tidak valid. Maka hingga saat ini, Kementerian Agama tidak pernah mengakui/menyetujui adanya program Dana Talangan Haji yang dijalankan oleh Bank Syariah.

Referensi

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Basir, Cik. (2009). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariaiah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Daud Ali, Muhammad. (1998). *Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Prersada
- Dewi, Gemala. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Depok : PT. Prenada Media (Kencana) Badan Penerbit FH-UI.
- Hamid, M. Arifin. (2004). “Hukum Ekonomi Islam: Urgensitas dan Prospektivitasnya di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 12 (1): 1-15.
- Jumadil. (2018). “Dinamika Sosial Pendidikan Islam di Mesir”. *Jurnal Keislaman Al-Ribath* 4, 119.
- Konaras, Abdurrahman. (2011). “Konsep Ideal Penerapan Hukum Perjanjian pada Bank Syariah di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 19 (4): 471-488.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marlang, A., Irwansyah., Kamaruddin, K. (2011) *Pengantar Hukum Indonesia (Cetakan Kedua)*. Makassar : Aspublishing.
- UPT MKU Universitas Hasanuddin. (2013). *Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama Islam*. Makassar : Universitas Hasanuddin.